



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKARTONO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 547202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 388.280.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 388.280.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 208.100.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L EXCEED Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
12.900.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
10.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 136.659.700

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 149.583.159

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 882.622.859

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 882.622.859

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.